BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Enrekang telah ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya efektif. Kondisi ini terlihat dari keterbatasan armada pengangkut, minimnya fasilitas penunjang, rendahnya kesadaran masyarakat, serta penerapan konsep 3R yang masih belum optimal. Selain itu, belum adanya peraturan yang memuat sanksi tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan semakin memperburuk situasi, karena perilaku tersebut terus berulang tanpa adanya efek jera. Dengan demikian, kebijakan yang ada tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan sampah tanpa mempertimbangkan perilaku masyarakat, kesiapan sarana prasarana, dukungan sumber daya, serta penguatan regulasi berupa penegakan aturan dan pemberian sanksi.

Meskipun demikian dari penelitian yang telah dilakukan. Maka implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Enrekang berdasarkan model implementasi kebijakan Grindle (1980) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepentingan Yang Terpengaruh Oleh Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Enrekang

   Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Enrekang sangat luas, mencakup

masyarakat umum, pelaku usaha, petugas kebersihan, pemerintah daerah, dan sektor pariwisata. Kebijakan ini berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena lingkungan yang bersih menciptakan kenyamanan dan mengurangi risiko penyakit, sedangkan pengelolaan yang tidak efektif menimbulkan bau, penumpukan sampah, dan pencemaran lingkungan. Bagi pelaku usaha, terutama sektor perdagangan dan kuliner, kebersihan memengaruhi citra dan pendapatan. Petugas kebersihan terdampak dari segi efisiensi serta keselamatan kerja yang bergantung pada ketersediaan sarana dan sistem kerja yang baik. Pemerintah daerah juga berkepentingan karena keberhasilan pengelolaan sampah mencerminkan kinerja dan tanggung jawab terhadap masyarakat, sedangkan kegagalan menurunkan kepercayaan publik. Sektor pariwisata pun bergantung pada kebersihan lingkungan sebagai daya tarik utama daerah. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, konsistensi peran pemerintah, serta dukungan dari pelaku usaha dan sektor lainnya.

2. Jenis Manfaat Yang Akan Dihasilkan dari Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Enrekang

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Enrekang memberikan manfaat yang komprehensif, mencakup aspek

lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Lingkungan yang lebih bersih berkontribusi pada berkurangnya risiko penyakit serta meningkatnya kenyamanan hidup masyarakat, sementara partisipasi sosial melalui gotong royong memperkuat ikatan kebersamaan. Dari sisi ekonomi, daerah yang bersih berpotensi menarik wisatawan dan investor sehingga mendorong perputaran ekonomi lokal. Namun demikian, manfaat kebijakan ini belum sepenuhnya merata akibat keterbatasan armada, fasilitas, dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat. Oleh karena itu, konsistensi pelaksanaan kebijakan dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi kunci agar manfaat yang dihasilkan lebih optimal dan berkelanjutan.

3. Derajat Perubahan Yang Diinginkan dari Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Enrekang

Derajat perubahan yang diinginkan dari kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Enrekang mencakup perubahan lingkungan fisik dan perilaku masyarakat secara bersamaan. Pemerintah daerah menargetkan terciptanya lingkungan yang bersih, bebas dari sampah liar, berkurangnya penggunaan plastik sekali pakai, serta kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. Selain itu, perubahan yang diharapkan juga meliputi penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), peningkatan pelayanan armada pengangkut, serta adanya regulasi dan sanksi tegas bagi pelanggar aturan.

Dengan arah perubahan ini, kebijakan pengelolaan sampah diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas kebersihan, tetapi juga membangun budaya baru masyarakat yang lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

4. Kedudukan Pembuat Kebijakan Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Enrekang

Kedudukan pembuat kebijakan dalam implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Enrekang memiliki posisi yang sangat strategis karena menentukan arah kebijakan sekaligus menjembatani kepentingan masyarakat. Peran ini tidak hanya sebatas menyusun aturan tertulis, tetapi juga mencakup perancangan strategi, koordinasi antarinstansi, serta pengawasan agar kebijakan dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup sebagai aktor teknis, dukungan tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta partisipasi aktif masyarakat melalui forum musyawarah dan sosialisasi. Namun, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana masih menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mendukung efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan sinergi antaraktor menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

5. Pelaksana Program Kebijakan Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Enrekang

Pelaksana program kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Enrekang memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup bersama Bidang Pengelolaan Sampah dan B3 bertugas mengatur strategi, mengawasi jalannya kebijakan, serta mengelola teknis operasional seperti armada, petugas kebersihan, dan TPA. Tenaga lapangan, sopir, kernet, dan petugas kebersihan menjadi ujung tombak pelaksanaan karena berhadapan langsung dengan persoalan sehari-hari, sementara masyarakat dan tokoh masyarakat turut berperan dalam meningkatkan kesadaran serta mendukung keberlanjutan program. Namun, pelaksanaan masih terkendala keterbatasan armada, tenaga kerja, dan sarana pendukung sehingga kebijakan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pelaksana, penyediaan sumber daya memadai, dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

6. Sumber Daya Yang Dikerahkan Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Enrekang

Sumber daya yang dikerahkan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Enrekang masih

terbatas, baik dari sisi armada, tenaga kebersihan, peralatan kerja, maupun sarana penunjang seperti TPS dan TPA. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah, terutama di wilayah yang sulit dijangkau secara geografis. Keterbatasan dana juga memperlambat upaya perbaikan sarana dan penambahan fasilitas yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya melalui penambahan armada, peningkatan jumlah tenaga kebersihan, serta perbaikan dan penyediaan sarana prasarana menjadi kebutuhan mendesak. Langkah ini penting untuk memastikan kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Enrekang, Peneliti menyarankan:

1. Penambahan armada pengangkut dan fasilitas pengelolaan sampah diperlukan untuk meningkatkan efektivitas layanan, mempermudah akses di wilayah sulit dijangkau, serta mendukung pengolahan sampah yang lebih efisien
2. Sosialisasi dan edukasi rutin mengenai pemilahan sampah serta penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse*, *Recycle*) diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong

partisipasi aktif, dan mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan.

3. Penguatan regulasi pengelolaan sampah melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) diperlukan untuk menetapkan aturan yang jelas, sanksi yang tegas, serta pengawasan rutin guna menciptakan efek jera dan meningkatkan disiplin masyarakat dalam pengelolaan sampah, sekaligus memperkuat koordinasi dan keterlibatan seluruh pihak.
4. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan masyarakat perlu dilakukan untuk memastikan program pengelolaan sampah berjalan terarah, berkelanjutan, serta mengurangi permasalahan seperti penumpukan sampah.

C. Produk Tesis

Dar hasil penelitian ini, penulis akan membuat produk tesis berupa Policy Brief. Produk ini disusun sebagai bentuk kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Enrekang. Policy brief ini memuat analisis permasalahan, alternatif kebijakan, dan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kondisi daerah.

Tujuan utama penyusunan policy brief ini adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang terukur dan aplikatif guna mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sasaran utama dari policy brief ini adalah Bupati Enrekang dan Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang. Bupati berperan sebagai pengambil kebijakan strategis di tingkat daerah, sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sampah.

Penulis akan menyerahkan secara langsung policy brief ini kepada Bupati Enrekang dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijakan pengelolaan sampah, terutama dalam penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta pembentukan peraturan daerah yang tegas dan berkelanjutan.